



Judul : Perkuat pengawasan lapas, DPR usul gunakan CCTV terkoneksi
Tanggal : Minggu, 14 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perkuat Pengawasan Lapas DPR Usul Gunakan CCTV Terkoneksi

KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya menyoroti menurunnya kualitas sistem pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Berbagai persoalan terus berulang, seperti peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal, hingga penyalahgunaan wewenang.

Willy mengungkapkan, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada era Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsudin pernah mampu memantau kondisi Lapas secara real time atau terkini. Karena itu, kenapa saat ini sistem tersebut justru mengalami kemunduran.

"Apa yang salah? Kenapa ini decline (merosot)?" tanya dia dengan heran.

Menurutnya, dengan teknologi saat ini, pengawasan lapas seharusnya bisa dilakukan lebih baik dan lebih terintegrasi. Caranya semua CCTV bisa terkoneksi dalam satu *dashboard* atau sistem. "Itu bukan hal yang sulit," tandas politikus Nasdem ini.

Untuk itu, Willy meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengevaluasi berbagai celah pengawasan yang masih terjadi. Kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh.

Selain itu, persoalan overkapasitas lapas, peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan membutuhkan langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur. "Kami ingin ada program yang extraordinary (luar biasa) dan

terukur," tegasnya.

Lebih lanjut Willy mengingatkan, lapas tidak selalu harus dipandang dari sisi negatif. Lapas harus menjadi tempat pembinaan yang mampu mendorong perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik.

Anggota Komisi XIII DPR Shadiq Pasadigoe menambahkan, sistem pengawasan Lapas perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis data secara real time atau terkini. Berbagai persoalan seperti peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal, dan penyalahgunaan kewenangan harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemasyarakatan.

"Di era digital saat ini, pengawasan lapas harus semakin maju. Teknologi harus membantu menciptakan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas," tegas Shadiq di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Shadiq menegaskan, Lapas tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai tempat pembinaan. Karena itu, pengawasan yang kuat harus berjalan seiring dengan program pembinaan yang berkualitas. "Kami ingin perbaikan lapas dimulai dari pembenahan sistem dan manajemennya," desak politisi Partai Nasdem ini.

Dia mengingatkan, Lapas bukan hanya tempat menghukum dan memberi efek jera, tapi membina dan memberi masa depan. Dengan itu, diharapkan akan lahir warga binaan yang kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. ■ TIF